



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Berlaku mulai Januari 2026, game di Indonesia wajib cantumkan kategori usia
Tanggal	: Minggu, 12 Oktober 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Berlaku Mulai Januari 2026

Game Di Indonesia Wajib Cantumkan Kategori Usia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) akan memerintahkan bahwa game atau gim yang beredar di semua game atau gim yang beredar di Indonesia mulai Januari 2026.

Kebijakan ini pun mendapat beragam respon.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ekosistem Digital Kominfo Edwin Hidayat Abdulah mengatakan, kebijakan ini akan diatur melalui Indonesian Game Rating System (IGRS), yang memberikan sentral pengembang mencantumkan kategori usia peminat sesuai konten gim yang mereka buat.

"Indonesia Game Rating System ini

adalah rating yang akan dibuat, bahwa

gim itu tidak sesuai bisa dimainkan oleh setiap orang."

"Adanya yang menunggu

pengembang untuk kategori usia tertentu," kata Edwin, di IGDX Business & Conference 2025 di

Kuta, Bali, Jumat (10/10/2025).

Dia mengungkapkan, saat ini banyak

game mengandung unsur kekerasan atau kekerasan dalam game yang tidak cocok dimainkan anak-anak di bawah umur. Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemerintah akan mewajibkan setiap gim memiliki label klasifikasi yang jelas, seperti

7+, 12+, atau 18+.

"Januari tahun depan, semua game harus di-ratings berdasarkan usianya masing-masing. Dari setiap game yang ada di Indonesia, sejauhnya mewajibkan pengembang mencantumkan kategori usia peminat sesuai konten gim yang mereka buat."

Dia menjelaskan, proses pengetaran sistem ini bakal dilakukan bertahap. Setiap pengembang atau penerbit gim wajib melakukan self-assessment terlebih dahulu untuk mendapatkan kategori usia produk mereka.

Selanjutnya, Kominfo akan memverifikasi dan mengecek secara rutin guna memastikan penilaian tersebut benar ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan, pengembang game yang tidak sesuai dengan target pasarnya secara umum. Mereka juga diminta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anak Indonesia."

"Jangan sampai mereka membuat game yang tidak sesuai dengan target pasarnya secara umum. Mereka juga diminta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anak Indonesia."

Dia mengaku optimistis industri gim di Indonesia akan memperbaiki kembali kebijakan ini. Sejauh ini, dia mengklaim para pengembang memberi respons yang baik dengan wasana terkait.

"Kita harapkan industri game ini bertumbuh dan sejahtera, tidak mengganggu pertumbuhan karakter anak-anak Indonesia," kata Edwin.

Menenggapi hal tersebut, Chairman

Lembaga Riset Keamanan Siber Cyber Security Research Center (CISSReC), Pratama Dahlia Persadha menilai, kebijakan ini menandai babak baru dalam tata kelola ekosistem digital nasional.

Khususnya, kata dia, dalam melindungi generasi dari paparan konten yang tidak sesuai dengan tingkat kesadaran mereka.

"Ini pada dasarnya, sebuah bentuk kesadaran negara terhadap kompleksitas dinamika game dan permainan di dunia digital yang semakin terbuka," ujar Pratama kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (11/10/2025).

Pratama menekankan, jika dililit dari perspektif waktu, kebijakan ini sebenarnya datang agak terlambat. Pasalnya, kata dia, selama lebih dari satu dekade terakhir, anak-anak Indonesia telah tumbuh dalam ekosistem gim yang

nyaris tanpa batas. Selain itu, dengan platform seperti Steam, Google Play, atau App Store memungkinkan mereka memainkan gim dengan konten kekerasan, pornografi terselubung, atau tindak kriminal tanpa batasan berarti," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin anggap kebijakan dari Kominfo ini sudah tepat dilakukan pada awal tahun 2026.

"Belum terlambat. Industri gim itu belum benar-benar matang, tetapi ada upaya mengawasi keserasian," tegas politisi PDI Perjuangan ini kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (11/10/2025).

Pratama menekankan, jika dililit dari perspektif waktu, kebijakan ini sebenarnya datang agak terlambat. Pasalnya, kata dia, selama lebih dari satu dekade terakhir, anak-anak Indonesia telah tumbuh dalam ekosistem gim yang

PRATAMA DAHLIA PERSADHA,
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

Kebijakan Klasifikasi Usia Langkah Korektif

2025-10-10 PRABU

Bagaimana Anda melihat kebijakan klasifikasi usia pada gim di pasar Indonesia?

Kebijakan klasifikasi usia ini lolos dalam diskusi yang penting. Meski datang setelah efek sosialnya belum terlihat dalam bentuk meningkatnya penjualan, tetapi perlu agresif di kalangan remaja, dan pengeseran pola interaksi sosial anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang virtual.

Apakah pengawasannya masih banyak atau hilang dari luar negeri yang bisa diakses secara luas?

Pengawasannya masih menjadi tugas penting untuk menjamin bahwa game yang kita ciptakan di Indonesia aman dan sesuai dengan standar etik dan moral. Tetapi, kita juga perlu memastikan agar kebijakan klasifikasi usia tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kerja sama antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan komunitas digital. ■ NNM

mekanisme kerja sama lintas negara atau kemitraan pemblokiran selektif berbasis konten, kebijakan berputera berhenti pada tataran administratif.

Adanya keberlanjutan pasti gelap aplikasi atau situs tidak resmi tempat anak-anak bisa mengunduh gim yang telah dihapus. Ketika itu, pengawasannya tidak sanggup lagi berjalan pada sejauh mana Pemerintah dapat membangun sistem pengawasannya sendiri.

“Content moderation” serta kerja sama dengan platform distribusi aplikasi global untuk menerapkan filter sesuai klasifikasi usia nasional. Dari sisi regulasi, apa di-

perlukan koordinasi lintas instansi agar penerapan klasifikasi usia ini benar-benar berjalan?

Terwujudnya keberlanjutan pasti gelap aplikasi atau situs tidak resmi tempat anak-anak bisa mengunduh gim yang telah dihapus. Ketika itu, pengawasannya tidak sanggup lagi berjalan pada sejauh mana Pemerintah dapat membangun sistem pengawasannya sendiri.

Apakah langkah klasifikasi usia untuk gim di Indonesia ini sudah tepat waktunya?

Menurut saya, belum terlambat jika dililit dari perspektif waktu. Selain itu, industri gim ini berkembang tenus dan cepat. Setidaknya ada upaya mengawasi.

Menurut Anda, apakah pengawasannya masih bisa efektif, mengingat masih banyak di luar negeri yang bisa diakses secara luas?

Persoalan pengawasannya dan penegakannya masih menjadi masalah di masyarakat. Tetapi, kita juga perlu mengingat bahwa kebijakan klasifikasi usia tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kerja sama antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan komunitas digital.

Dari sisi regulasi, apa diperlukan koordinasi lintas sektor agar pe-

nerapan klasifikasi usia ini benar-benar berjalan?

Kalan Pemerintah serius manu meningkat gerakannya masa depan Indonesia akan berjalan dengan baik. Selain itu, industri gim ini berkembang tenus dan cepat. Setidaknya ada upaya mengawasi.

Bagaimana agar aturan ini benar-benar melindungi generasi muda tanpa menghambat kreativitas industri?

Sosial efek terhadap industri gim lokal, misalnya saya akan lebih suka berinvestasi di sektor kegiatan lain, terutama noni ada pada Kominfo. Kalau menang nanti ada unsur pidanya, polisi juga harus mengawasi.

Lantas, apakah Pemerintah perlu memberi kemudahan khusus bagi pengembangan gim lokal agar

tidak tersendat?

Pertih kemudahan pengembangan gim lokal juga seperti bisa dicatat dalam kajian kebijakannya di Kominfo. Efeknya tidak hanya pada industri, tetapi juga pada sektor lainnya. Pemerintah berkomitmen penuh mengembangkan industri gim lokal.

Jika nanti ditemukan pelanggaran atau gim yang tak baik, sexual klasifikasi usia, maka ada sanksi dan pengawasan atau sanksi yang ideal agar kebijakan ini punya efek jera tadi tetapi yang jera itu sifatnya pidana. Pemerintah sebaiknya menjelaskan sanksinya apa, ada tingkatannya. Kita belum tahu, tetapi kita tahu bahwa ini hanya seputar mencantumkan label rating saja kemudian lepas tangani. ■ NNM

mechanisme kerja sama lintas negara atau kemitraan pemblokiran selektif berbasis konten, kebijakan berputera berhenti pada tataran administratif.

Adanya keberlanjutan pasti gelap aplikasi atau situs tidak resmi tempat anak-anak bisa mengunduh gim yang telah dihapus. Ketika itu, pengawasannya tidak sanggup lagi berjalan pada sejauh mana Pemerintah dapat membangun sistem pengawasannya sendiri.

“Content moderation” serta kerja sama dengan platform distribusi aplikasi global untuk menerapkan filter sesuai klasifikasi usia nasional. Dari sisi regulasi, apa di-

perlukan koordinasi lintas instansi agar penerapan klasifikasi usia ini benar-benar berjalan?

Terwujudnya keberlanjutan pasti gelap aplikasi atau situs tidak resmi tempat anak-anak bisa mengunduh gim yang telah dihapus. Ketika itu, pengawasannya tidak sanggup lagi berjalan pada sejauh mana Pemerintah dapat membangun sistem pengawasannya sendiri.

Apakah langkah klasifikasi usia untuk gim di Indonesia ini sudah tepat waktunya?

Menurut saya, belum terlambat jika dililit dari perspektif waktu. Selain itu, industri gim ini berkembang tenus dan cepat. Setidaknya ada upaya mengawasi.

Menurut Anda, apakah pengawasannya masih bisa efektif, mengingat masih banyak di luar negeri yang bisa diakses secara luas?

Persoalan pengawasannya dan penegakannya masih menjadi masalah di masyarakat. Tetapi, kita juga perlu mengingat bahwa kebijakan klasifikasi usia tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kerja sama antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan komunitas digital.

Dari sisi regulasi, apa diperlukan koordinasi lintas sektor agar pe-

nerapan klasifikasi usia ini benar-benar berjalan?

Kalan Pemerintah serius manu meningkat gerakannya masa depan Indonesia akan berjalan dengan baik. Selain itu, industri gim ini berkembang tenus dan cepat. Setidaknya ada upaya mengawasi.

Bagaimana agar aturan ini benar-benar melindungi generasi muda tanpa menghambat kreativitas industri?

Sosial efek terhadap industri gim lokal, misalnya saya akan lebih suka berinvestasi di sektor kegiatan lain, terutama noni ada pada Kominfo. Kalau menang nanti ada unsur pidanya, polisi juga harus mengawasi.

Lantas, apakah Pemerintah perlu memberi kemudahan khusus bagi pengembangan gim lokal agar

tidak tersendat?

Pertih kemudahan pengembangan gim lokal juga seperti bisa dicatat dalam kajian kebijakannya di Kominfo. Efeknya tidak hanya pada industri, tetapi juga pada sektor lainnya. Pemerintah berkomitmen penuh mengembangkan industri gim lokal.

Jika nanti ditemukan pelanggaran atau gim yang tak baik, sexual klasifikasi usia, maka ada sanksi dan pengawasan atau sanksi yang ideal agar kebijakan ini punya efek jera tadi tetapi yang jera itu sifatnya pidana. Pemerintah sebaiknya menjelaskan sanksinya apa, ada tingkatannya. Kita belum tahu, tetapi kita tahu bahwa ini hanya seputar mencantumkan label rating saja kemudian lepas tangani. ■ NNM

mechanisme kerja sama lintas negara atau kemitraan pemblokiran selektif berbasis konten, kebijakan berputera berhenti pada tataran administratif.

Adanya keberlanjutan pasti gelap aplikasi atau situs tidak resmi tempat anak-anak bisa mengunduh gim yang telah dihapus. Ketika itu, pengawasannya tidak sanggup lagi berjalan pada sejauh mana Pemerintah dapat membangun sistem pengawasannya sendiri.

“Content moderation” serta kerja sama dengan platform distribusi aplikasi global untuk menerapkan filter sesuai klasifikasi usia nasional. Dari sisi regulasi, apa di-

perlukan koordinasi lintas instansi agar penerapan klasifikasi usia ini benar-benar berjalan?

Terwujudnya keberlanjutan pasti gelap aplikasi atau situs tidak resmi tempat anak-anak bisa mengunduh gim yang telah dihapus. Ketika itu, pengawasannya tidak sanggup lagi berjalan pada sejauh mana Pemerintah dapat membangun sistem pengawasannya sendiri.

Apakah langkah klasifikasi usia untuk gim di Indonesia ini sudah tepat waktunya?

Menurut saya, belum terlambat jika dililit dari perspektif waktu. Selain itu, industri gim ini berkembang tenus dan cepat. Setidaknya ada upaya mengawasi.

Menurut Anda, apakah pengawasannya masih bisa efektif, mengingat masih banyak di luar negeri yang bisa diakses secara luas?

Persoalan pengawasannya dan penegakannya masih menjadi masalah di masyarakat. Tetapi, kita juga perlu mengingat bahwa kebijakan klasifikasi usia tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kerja sama antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan komunitas digital.

Dari sisi regulasi, apa diperlukan koordinasi lintas sektor agar pe-

nerapan klasifikasi usia ini benar-benar berjalan?

Kalan Pemerintah serius manu meningkat gerakannya masa depan Indonesia akan berjalan dengan baik. Selain itu, industri gim ini berkembang tenus dan cepat. Setidaknya ada upaya mengawasi.

Bagaimana agar aturan ini benar-benar melindungi generasi muda tanpa menghambat kreativitas industri?

Sosial efek terhadap industri gim lokal, misalnya saya akan lebih suka berinvestasi di sektor kegiatan lain, terutama noni ada pada Kominfo. Kalau menang nanti ada unsur pidanya, polisi juga harus mengawasi.

Lantas, apakah Pemerintah perlu memberi kemudahan khusus bagi pengembangan gim lokal agar

tidak tersendat?

Pertih kemudahan pengembangan gim lokal juga seperti bisa dicatat dalam kajian kebijakannya di Kominfo. Efeknya tidak hanya pada industri, tetapi juga pada sektor lainnya. Pemerintah berkomitmen penuh mengembangkan industri gim lokal.

Jika nanti ditemukan pelanggaran atau gim yang tak baik, sexual klasifikasi usia, maka ada sanksi dan pengawasan atau sanksi yang ideal agar kebijakan ini punya efek jera tadi tetapi yang jera itu sifatnya pidana. Pemerintah sebaiknya menjelaskan sanksinya apa, ada tingkatannya. Kita belum tahu, tetapi kita tahu bahwa ini hanya seputar mencantumkan label rating saja kemudian lepas tangani. ■ NNM